

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. *Agency Theory*

*Agency Theory* (Teori Keagenan) pertama kali diperkenalkan oleh Jansen & Meckling, 1976. Dalam kerangka teori ini, wewenang dari prinsipal diberikan kepada agen untuk mengelola dan menjalankan operasi perusahaan. Dalam praktiknya, kedua pihak sering kali memiliki kepentingan yang tidak sepenuhnya sejalan, sehingga dapat menimbulkan konflik. Hal ini terjadi ketika agen lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti memperoleh imbalan atau menjaga citra kinerja, sedangkan prinsipal berfokus pada terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien dan transparan. Konflik agensi muncul ketika manajer terdorong untuk mengubah laporan keuangan demi menurunkan kewajiban pajak atau mengamankan reputasi keuangan perusahaan, terkhususnya di kala mengalami kondisi *financial distress*. Penerapan prinsip konservatisme berfungsi sebagai mekanisme yang dapat menekan praktik *tax avoidance*, karena prinsip ini mendorong pencatatan kerugian lebih cepat serta menunda pengakuan keuntungan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berhati-hati. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan laba kena pajak dan secara legal mengurangi beban fiskal, tetapi juga berperan dalam menekan perilaku oportunistik manajemen. Seperti yang dikonfirmasi dari penelitian Saputra et al., (2022) dan Swandewi & Noviari, (2020a) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Peran ini menjadi sangat relevan, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial.

#### 2.1.2. *Signal Theory*

*Signal Theory* (Teori Sinyal) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan atau asimetri informasi. Dalam konteks riset ini, teori sinyal diimplementasikan untuk menelaah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian akuntansi berfungsi sebagai medium komunikasi informasi berkualitas tinggi dari perusahaan terbuka di Indonesia kepada pihak eksternal yang mengalami keterbatasan akses informasi. Melalui penerapan kebijakan akuntansi konservatif, manajemen memberikan sinyal positif mengenai disiplin keuangan, kualitas laba, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau kesulitan keuangan. Konservatisme akuntansi, seperti pengakuan kerugian yang lebih cepat dibandingkan keuntungan, tidak hanya membantu menyajikan informasi keuangan yang lebih berkualitas dan andal, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian serta akuntabilitas manajerial dalam menjaga stabilitas perusahaan. Penerapan prinsip ini sekaligus menghindari praktik *overstatement* terhadap laba dan aktiva, yang dapat membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, konservatisme akuntansi menjadi alat komunikasi tidak langsung yang digunakan oleh manajemen untuk menginformasikan prospek jangka panjang perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan perpajakan melalui pengakuan beban dan kerugian yang lebih tepat waktu sesuai dengan konsep dasar dalam teori sinyal.

### 2.1.3. *Positive Accounting Theory*

*Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif) pertama kali diperkenalkan oleh William H. Beaver (1968) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ross Watts dan Jerold Zimmerman (1978, 1986, 1990). Landasan dari teori ini adalah observasi empiris terhadap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan dalam teori akuntansi normatif. Konservatisme akuntansi merupakan salah satu metode yang umum diterapkan dengan tujuan mengurangi fluktuasi laba, mencerminkan kestabilan kondisi keuangan, serta membantu menekan ketimpangan informasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. *Positive Accounting Theory* juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu faktor, seperti tekanan keuangan, dapat memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi tertentu. *Positive Accounting Theory* berfungsi sebagai landasan teoretis penting untuk memahami faktor ekonomi yang mendorong praktik akuntansi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional serta pengelolaan risiko yang lebih efektif dalam dinamika bisnis yang senantiasa berkembang.

## 2.2. Konservatisme Akuntansi

Basu (1997) mengemukakan bahwa inti dari konservatisme akuntansi terletak pada kecenderungan akuntan untuk menggunakan standar verifikasi yang lebih ketat dalam pengakuan informasi positif dibandingkan dengan informasi negatif. Praktik ini bertujuan untuk menghindari pelaporan kondisi keuangan yang terlalu optimistis (*overstatement*) dan sebaliknya, menyuguhkan gambaran yang lebih faktual atas kinerja serta posisi keuangan entitas tersebut. Sementara itu, Watts (2003) menambahkan bahwa prinsip ini membuat laporan keuangan lebih cepat mencerminkan informasi negatif yang terjadi. Sejalan dengan pandangan tersebut, *Financial Accounting Standards Board* menegaskan bahwa konservatisme mendorong penundaan pengakuan pendapatan hingga benar-benar terealisasi serta mempercepat pencatatan beban ketika jumlahnya sudah dapat diperkirakan.

Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan segera mengakui semua potensi kerugian dan beban meskipun realisasinya belum pasti. Penerapan konservatisme akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk memperkuat kualitas laporan keuangan serta memperbaiki praktik tata kelola perusahaan. Pertama, konservatisme memiliki peran penting dalam menekan biaya keagenan dengan membatasi ruang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Penerapan prinsip ini menjadikan laporan keuangan lebih andal serta menurunkan risiko terjadinya penyimpangan informasi keuangan. Kedua, konservatisme juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi risiko hukum serta membantu dalam pemenuhan kewajiban kontraktual, seperti perjanjian hutang. Perusahaan umumnya menerapkan pelaporan keuangan yang bersifat konservatif sebagai upaya untuk menghindari potensi gugatan hukum dari kreditur maupun pemegang saham akibat penyajian laba yang terlalu optimistis, serta guna memenuhi ketentuan dalam perjanjian keuangan. Melalui penerapan pelaporan yang lebih berhati-hati, informasi yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan mampu memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, konservatisme juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi investasi dan kualitas tata kelola perusahaan. Dengan menunda pengakuan laba yang belum pasti, prinsip ini mendorong penggunaan kas yang lebih efektif serta menekan kemungkinan terjadinya manipulasi oleh manajemen.

### 2.3. Tax Avoidance

Dalam batas legalitas, *tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh entitas bisnis untuk meningkatkan efektivitas perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak yang terutang. Proses ini dilakukan dengan menemukan dan memanfaatkan celah interpretasi dalam peraturan pajak yang berlaku. Secara signifikan, hal ini membedakannya dari tindakan yang dikenal sebagai penggelapan pajak yang tergolong sebagai tindak pidana. Praktik ini umumnya dilakukan melalui pengaturan pelaporan pendapatan, penetapan harga transfer antar entitas, serta penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan. Menurut Moeljono, (2020), *tax avoidance* adalah strategi manajemen pajak yang legalitasnya diakui secara hukum. Namun, status legal tersebut tidak bersifat mutlak. Praktik ini dapat dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan secara berlebihan atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Motivasi utama dari implementasi strategi *tax avoidance* adalah mencapai optimalisasi efisiensi dalam manajemen keuangan perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai bagi investor. Dengan melakukan perencanaan pajak secara legal untuk menekan beban pajak, perusahaan dapat memanfaatkan lebih banyak dana guna mendukung aktivitas operasional, memperluas usaha, serta meningkatkan tingkat keuntungan. Upaya ini juga membantu menjaga stabilitas arus kas dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar. Selain itu, penerapan strategi *tax avoidance* yang tepat menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang hati-hati dan berfokus pada kepentingan pemegang saham, selama tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat *tax avoidance* antara lain:

- a. Kualitas lingkungan informasi internal: Perusahaan dengan sistem informasi internal yang terorganisir dan andal cenderung mampu menjalankan strategi *tax avoidance* secara lebih efisien tanpa memperbesar risiko kepatuhan pajak.
- b. Kemampuan manajerial: Manajer dengan kompetensi tinggi biasanya lebih terampil dalam menyusun strategi *tax avoidance* yang mampu menekan beban pajak secara legal dan efisien.
- c. Transparansi dan tata kelola: Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi keuangan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena meningkatnya pengawasan publik maupun regulator.
- d. Faktor sosial dan etika: Tingkat religiusitas dan tekanan etika di lingkungan perusahaan dapat menurunkan kecenderungan *tax avoidance* yang agresif.

### 2.4. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Strategi *tax avoidance* suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran konservatisme akuntansi. Prinsip tersebut mengarahkan perusahaan untuk mengakui potensi kerugian secara lebih cepat dan menunda pengakuan pendapatan. Implikasi langsungnya adalah laba yang dilaporkan secara akuntansi akan cenderung disajikan lebih rendah. Keadaan tersebut pada akhirnya berpotensi menekan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penerapan konservatisme dalam akuntansi kerap dijadikan strategi untuk memengaruhi pelaporan laba, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang. Dengan demikian, konservatisme akuntansi dapat berfungsi sebagai sarana yang sah secara hukum untuk menjalankan praktik *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Lismiyati & Herliansyah, (2021) menemukan bahwa penerapan konservatisme akuntansi berpengaruh positif serta berperan penting dalam mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian Vionika et al., (2024) dan Rudianti & Hermawan,

(2023) justru menemukan hasil yang berbeda bahwa implementasi konservatisme akuntansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan telaah menyeluruh atas hasil penelitian sebelumnya dan dasar teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

H1 : Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

## 2.5. *Financial Distress*

Kondisi *financial distress* mencerminkan situasi di mana perusahaan mengalami tekanan ekonomi yang bersumber dari likuiditas atau kegagalan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut sering kali mendorong manajemen untuk mengambil langkah-langkah konservatif demi menjaga stabilitas keuangan serta mempertahankan kepercayaan investor. Secara umum, *financial distress* dipandang sebagai fase penurunan kesehatan keuangan yang muncul sebelum perusahaan menghadapi potensi kebangkrutan. Ketika sebuah perusahaan menghadapi masalah keuangan, hal itu biasanya mencerminkan adanya tekanan pada aspek likuiditas. Jika kondisi tersebut berlanjut hingga tahap *financial distress*, perusahaan akan kesulitan memenuhi seluruh kewajiban yang dimilikinya. Apabila situasi ini tidak segera diatasi dengan langkah yang tepat, maka risiko kebangkrutan menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari (Hutauruk et al. 2021). Adapun konsep *financial distress* dapat dijelaskan antara lain:

- a. Berdasarkan penelitian Gunarto & Adi, (2022) *financial distress* merupakan tahap awal yang mendahului terjadinya likuidasi atau kebangkrutan. Pada fase ini, perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi keuangan secara signifikan. Pada dasarnya, *financial distress* merupakan situasi di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan karena aliran kas yang diperoleh tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, termasuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Keadaan ini sering kali diidentifikasi melalui munculnya kerugian operasional yang terus terjadi dari waktu ke waktu.
- b. Pencatatan kerugian akuntansi oleh perusahaan tidak serta-merta mengindikasikan bahwa entitas tersebut berada dalam kondisi *financial distress*. Dalam perspektif Hutauruk et al., (2021), *financial distress* mencerminkan situasi fundamental korporasi yang berkolerasi langsung dengan risiko keberlangsungan usaha (*going concern*). Evaluasi terhadap kondisi tersebut dilakukan melalui analisis keuangan yang komprehensif dan mendalam, bukan hanya didasarkan pada hasil laporan laba rugi dalam satu periode tertentu.

## 2.6. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi

Saat menghadapi *financial distress* pihak manajemen memprediksikan akan cenderung lebih proaktif dalam mengeksplorasi mekanisme pengurangan kewajiban pajak, salah satunya lewat implementasi prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan. Gunarto & Adi, (2022) menemukan kolerasi positif antara konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance*, namun pengaruh tersebut tidak terkonfirmasi secara signifikan. Studi tersebut juga tidak membuktikan peran signifikan dari *financial distress* sebagai moderasi, mengimplikasikan hubungan konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance*. Atas dasar tersebut, riset ini bertujuan melakukan pengujian kembali apakah *financial distress* berfungsi sebagai moderasi dalam keterkaitan konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance*.

H2 : *Financial Distress* memperkuat hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

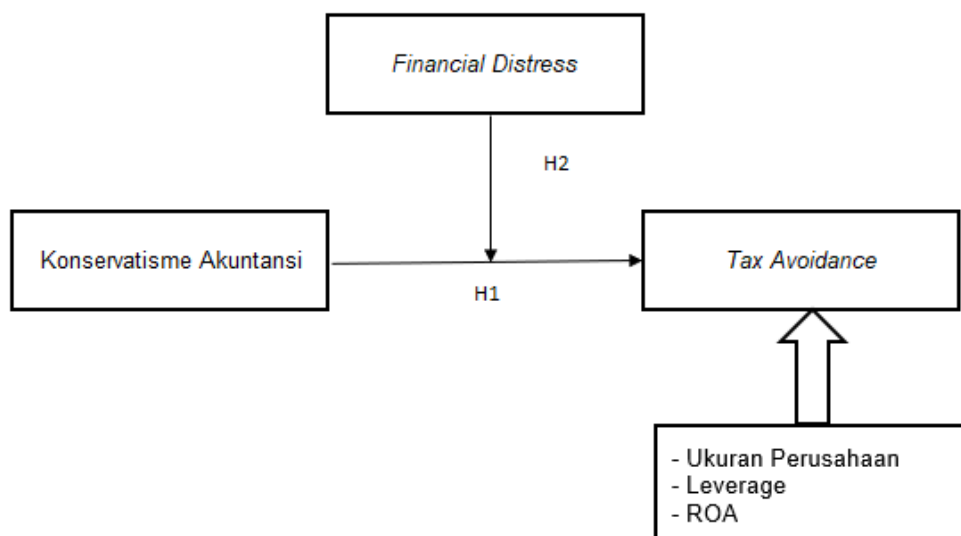
Penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif yang dikembangkan Basu (1997). Kedua, data yang diambil dari periode observasi tahun 2021-2023. Ketiga, penelitian berfokus pada sektor manufaktur karena karakteristik kegiatan operasionalnya yang lebih beragam dan rumit dibandingkan industri lain. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan manufaktur memiliki kecenderungan lebih besar terhadap praktik manipulasi laporan keuangan. Keempat, penelitian ini memasukkan *financial distress* sebagai variabel moderasi, suatu pendekatan yang masih jarang digunakan dalam kajian terdahulu dengan harapan dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan studi mengenai konservatisme akuntansi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang variabel yang memengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Selain itu, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk pengambilan keputusan baik investor maupun kreditur saat mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman. Dengan mengetahui apakah perusahaan cenderung menerapkan prinsip konservatisme, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas perusahaan publik dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.

Studi sebelumnya telah menyelidiki berbagai komponen yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk menggunakan konservatisme akuntansi Narenda & Sari, (2022) menemukan bahwa peluang pertumbuhan berdampak besar terhadap tingkat konservatisme akuntansi, sementara insentif pajak tidak memiliki dampak yang signifikan. Studi Sitepu et al., (2022) menemukan korelasi positif antara beban pajak dan praktik konservatisme akuntansi. Priatiningsih & Myas Sari, (2023) mengkaji pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi dari perspektif tata kelola perusahaan. Mereka menemukan bahwa kinerja komite audit tidak memiliki dampak yang signifikan. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan latar belakang pendidikan sebagian besar anggota komite audit yang kurang relevan dengan bidang akuntansi, meskipun secara konseptual komite ini memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro juga menjadi perhatian dalam sejumlah studi. Melalui pendekatan kualitatif, Jusman et al., (2024) menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berperan strategis dalam menghadapi krisis ekonomi global. Prinsip kehati-hatian tersebut membantu menjaga stabilitas keuangan melalui pengakuan kerugian lebih awal, meskipun dapat menimbulkan risiko penilaian yang lebih rendah terhadap aset. Sejumlah literatur juga menyoroti keterkaitan konservatisme dengan variabel lain seperti kualitas laba dan penghindaran pajak, meskipun hasilnya masih beragam. Rudyanto et al., (2023) menemukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Namun, pengaruh tersebut cenderung melemah pada perusahaan yang memiliki koneksi politik karena hubungan politik dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disusun secara konservatif. Hubungan antara konservatisme dan *tax avoidance* juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Wilcocks (2024) membedakan konservatisme menjadi dua bentuk, yaitu konservatisme bersyarat dan konservatisme tidak bersyarat. Penelitiannya menunjukkan bahwa konservatisme bersyarat memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*, sedangkan konservatisme tidak bersyarat justru berkorelasi negatif. Hasil ini sejalan dengan temuan Swandewi & Noviari, (2020b) yang menyimpulkan bahwa penerapan konservatisme akuntansi dapat menekan praktik *tax avoidance*. Namun, (Susanti 2019) memperoleh hasil yang berbeda, di mana konservatisme akuntansi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi *financial distress* juga menjadi variabel yang kerap dikaji, baik

sebagai determinan konservatisme maupun sebagai faktor pendorong *tax avoidance*. (Caniago and Serly 2023) menemukan bahwa *financial distress* bersama *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penerapan konservatisme. Dalam konteks *tax avoidance*, Swandewi & Noviari, (2020b) Studi ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki korelasi positif dengan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan yang menghadapi masalah keuangan cenderung menggunakan strategi pajak untuk mempertahankan citra positif mereka di mata pemangku kepentingan Feizi et al., (2016) menemukan hal yang sama, menyatakan bahwa kesulitan keuangan memengaruhi penghindari pajak, dan krisis ekonomi global memperkuat hubungan ini. Dari segi metodologi, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi berganda atau analisis data panel yang diolah menggunakan program statistik seperti EViews atau SPSS. Meskipun demikian, terdapat pula penelitian yang memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual. Kerangka Berpikir

## 2.8. Kerangka Berpikir

Keterkaitan antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance* dianalisis dalam penelitian ini dengan *financial distress* yang berperan sebagai variabel moderasi. Implementasi prinsip konservatisme akuntansi dapat mengakibatkan penurunan pada laba kena pajak yang dilaporkan. Hal ini menyiratkan adanya potensi pemanfaatan konservatisme sebagai strategi untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga konservatisme akuntansi dihipotesiskan berpengaruh searah (positif) terhadap praktik tersebut. Akan tetapi, tingkat pengaruh tersebut dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi *financial distress*, manajemen cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk meningkatkan efisiensi berbagai beban, termasuk beban pajak. Dalam situasi tersebut, penerapan konservatisme akuntansi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak sehingga mengurangi kewajiban perpajakan. Kondisi *financial distress* diduga dapat memperkuat hubungan antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*. Untuk meningkatkan validasi hasil analisis, penelitian ini juga menambahkan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *return on assets*, guna memperkuat keandalan hasil penelitian.



**Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah Penulis (2025)